



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEWI SOERİYAWATI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 900140

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 6.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/110 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m²/122 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah Seluas 80 m² di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m²/139 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 410.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 248.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT CBS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
5. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z CW Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 210.000.000



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ---
Rp. 6.820.500.000

III. HUTANG

Rp. ---
Rp. 6.820.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.